

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Kedaulatan tersebut memberikan predikat yang tinggi kepada rakyat untuk bermusyawarah dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai suatu bangsa yang menganut sistem demokrasi dengan menempatkan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyatnya, rakyat harus berperilaku aktif dalam menjalankan demokrasi dan aktif menerjemahkan kedaulatan rakyat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum sendiri sangat erat berkaitan dengan demokrasi di Indonesia, dan pemilihan umum (pemilu) menjadi kunci terciptanya demokrasi (Sukma & Wardhani, 2018).

Pemilu sebagai wahana resmi perebutan kursi kekuasaan menjadi arena partai politik bagi para calon Legislatif maupun Eksekutif untuk berkompetisi atau menarik simpati rakyat. Melalui pemilu, rakyat berharap dapat diberikan pemimpin serta wakil rakyat yang sesuai dengan harapan. Indonesia menaruh sebuah harapan penuh melalui pemimpin yang terpilih. Rakyat berharap pemimpin yang terpilih dapat mengharumkan nama Indonesia dan dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya yang ada di seluruh Dunia, mampu mengurangi kesenjangan antar rakyat Indonesia serta berhasil memperbaiki perekonomian, pendidikan maupun tingkat kesehatan rakyat, kemudian pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat secara merata dan berkeadilan (Hidayat, 2020).

Partisipasi pemilih merupakan suatu kebutuhan demi tercipta atau terwujudnya harapan rakyat dan tetap berjalannya demokrasi agar sistem politik tidak terhambat. Pemilu merupakan bagian penting atau komponen utama demokrasi yang penting untuk menjembatani suara-suara rakyat yang berdaulat

agar memberikan pilihannya terhadap seseorang sebagai pemimpin atau wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan (UI, 2009).

Menurut Budiardjo dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Ilmu Politik” dikutip oleh (Miaz, 2012) mengatakan partisipasi politik adalah aktivitas seorang atau sekelompok orang yang berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik, dapat melalui berbagai cara seperti mengikuti pemilihan umum dan, secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah sebuah provinsi yang terletak di barat laut Pulau Jawa, daerah khusus yang berfungsi menjadi ibukota negara, maka DKI Jakarta mempunyai kekhususan dibanding provinsi atau daerah lainnya di Indonesia. Kekhususan yang menonjol adalah DKI Jakarta mempunyai hak otonom pada tingkat provinsi, seperti yang tercantum pada UU No. 29 Tahun 2007 mengenai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. DKI Jakarta tidak memiliki otonomi di tingkat kabupaten/kotanya karena sifat kabupaten dan kotanya adalah administratif.

Jakarta Timur terbentuk pada saat DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin yang memimpin DKI Jakarta pada tahun 1966-1977. Ali Sadikin adalah Gubernur DKI Jakarta yang ke-7. Banyak gebrakan yang dilakukan pada masa kepemimpinannya. Ketika dilantik oleh Presiden Soekarno, ia melakukan berbagai kebijakan di antaranya membagi DKI Jakarta menjadi lima kotamadya, yaitu Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1978). Lebih lengkapnya, DKI Jakarta pada saat itu dibagi menjadi lima kota, 22 kecamatan, dan 204 kelurahan, Kepulauan Seribu adalah bagian dari Jakarta Utara.

Jakarta Timur dewasa ini mempunyai pusat kota atau ibukota yang terletak di Cakung, ditandai dengan berdirinya gedung pemerintahan Walikota di daerah Pulogebang. Dalam rentang waktu 1966-2022, Jakarta Timur sudah dipimpin oleh 12 Walikota, mulai dari Alamsudin hingga M. Anwar. Kurun waktu 1966-2022 telah menunjukkan bahwa usia Jakarta Timur sudah mencapai 56 tahun.

Usia tersebut jika dikonversi pada kehidupan manusia tentu bukan lagi usia muda, sehingga tidaklah berlebihan jika harapan masyarakat pada Jakarta Timur sedemikian besar. Jakarta Timur merupakan wilayah terluas di ibukota dibandingkan dengan wilayah kota dan kabupaten administrasi lainnya. Jakarta Timur memiliki luas wilayah 188,0315 km². Jakarta Utara seluas 146,6628 km², Jakarta Selatan 141,2673 km², Jakarta Barat 129,5289 km², Jakarta Pusat 48,1323 km², dan Kepulauan Seribu seluas 8,6961 km². Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Cakung dengan luas wilayah 42,2780 km² dan kelurahan terluas adalah Halim Perdana Kusuma dengan luas wilayah 13,0685 km² (Gubernur DKI Jakarta, 2007). Apabila dikonversi ke dalam data statistika, Kecamatan Cakung merupakan 22.63% dari luas wilayah Jakarta Timur, sedangkan Kelurahan Halim Perdana Kusuma merupakan 60.40% dari luas wilayah Kecamatan Makasar, dan 6.96% dari luas wilayah Jakarta Timur. Luas wilayah Kelurahan Halim Perdana Kusuma ditunjang dengan adanya Bandara Halim Perdana Kusuma. Total jumlah penduduk di DKI Jakarta, Jakarta Timur mempunyai data penduduk yang teregistrasi pada tahun 2017 sebanyak 2.946.594 jiwa. Kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 17.365,59 jiwa/km², diikuti oleh Jakarta Barat 2.326.721, Jakarta Selatan 2.189.015, Jakarta Utara 1.715.581, Jakarta Pusat 1.138.516, dan Kepulauan Seribu 27.591.5. Data penduduk tersebut menjadi sebuah acuan bahwa Jakarta Timur memiliki variabel luas wilayah dan jumlah penduduk lebih banyak daripada wilayah administrasi lainnya di Provinsi DKI Jakarta.

Kota Jakarta Timur untuk kategori pemerintah kota se-Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak dan mengungguli kota lain, seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan Bekasi. Jika digabungkan dengan kabupaten, maka Jakarta Timur menempati posisi kedua di bawah Kabupaten Bogor. Kecamatan yang mempunyai populasi terbanyak adalah Kecamatan Cakung diikuti Duren Sawit dan Jatinegara, sedangkan kecamatan yang populasinya paling sedikit adalah Kecamatan Matraman. Tidaklah mengagetkan karena ibukota merupakan daya tarik utama serta menjanjikan pekerjaan dan berbagai daya tarik lain, seperti pendidikan, hiburan, dan pusat perekonomian di Indonesia sehingga

orang luar DKI Jakarta kemudian datang dan menetap di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Timur. Tentu menjadi ketertarikan peneliti untuk melihat bagaimana peran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota administrasi Jakarta Timur untuk meningkatkan partisipasi pemilih ditengah kompleksitas, luas serta banyaknya penduduk di Jakarta Timur.

Pengalaman mengelola pemilu serentak adalah hal baru bagi KPU kota administrasi Jakarta Timur sehingga tidaklah mengherankan jika dalam menjalankan tugas, wewenang serta kewajibannya KPU kota administrasi Jakarta Timur akan menemukan permasalahan, diantaranya;

1. Bertebarnya issue-issue yang semakin membuat suasana semakin “panas” yang akibatnya berdampak pada proses penyelenggaraan seperti “*KPU tidak netral*”, “*Surat suara sudah tercoblos calon tertentu*”.
2. Pada pemilu tahun 2019, pendataan pemilih menggunakan E-KTP dengan basis de jure yang artinya pemilih harus memilih atau mencoblos sesuai dengan alamat yang tertera di E-KTPnya, maka proses pemutahiran data pemilih ini mengalami banyak kendala dilapangan karena basis yang digunakan untuk melakukan pencoblosan adalah alamat yang tertera di E-KTP, sebagai contoh banyak pemilih disuatu tempat tidak terdata karena E-KTP nya tidak sesuai dengan tempat dimana dia tinggal, selain itu masalah dan kendala yang lain adalah pemilih tidak mau melakukan pendaftaran sesuai dengan alamat E-KTP nya, kendala dan masalah tersebut tentunya sangat berdampak dalam proses pemutahiran dan pendataan pemilih.
3. KPU kota administrasi Jakarta Timur dalam kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) juga menunjukkan adanya pandangan masyarakat yang beragam, ada yang skeptis, ada yang dikira minta sumbangan dan sikap acuh kepada petugas serta ada juga yang curiga, banyak juga yang meremehkan kegiatan pencoklit yang dilakukan oleh petugas dengan pemikiran bahwa tanpa harus dicoklitpun masih bisa untuk mencoblos dengan bermodalkan E-KTP, ini yang menjadi persoalan terkait kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya proses pemutahiran data pemilih.

4. KPU kota administrasi Jakarta Timur belum bisa menjangkau semua kelompok masyarakat yang ada di Kota Jakarta timur untuk melakukan sosialisasi dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan sumber daya.

Permasalahan dan tantangan lainnya tentu masih dijumpai KPU kota administrasi Jakarta Timur dan ini menjadi tugas yang cukup unik serta rumit. KPU kota administrasi Jakarta Timur sebagai salah satu penyelenggara pemilu mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menyukseskan pemilu dengan jujur dan adil (Sri, Dewi Lestari, Ruskin Azikin, 2020).

Tabel 1: Tingkat Partisipasi Pemilih Kotamadya Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu Tahun 2014-2019

Kota Adm.	Pemilu Tahun 2014				Pemilu Tahun 2019			
	DPR	DPRD	DPD	Pilpres	DPR	DPRD	DPD	Pilpres
Kep. Seribu	72,52%	72,52%	72,52%	73,57%	75,10%	74,80%	75,97%	82%
Jakarta Timur	69,7%	69,7%	69,7%	75,98%	79,85%	79,80%	80%	80,48%
Jakarta Barat	65,64%	65,64%	65,64%	70,6%	78,97%	78,95%	78,98%	79,72%
Jakarta Selatan	64,6%	64,6%	64,6%	71,63%	78,48%	78,43%	78,51%	79,65%
Jakarta Pusat	64,3%	64,3%	64,3%	70,26%	76,94%	76,91%	77,10%	78,06%
Jakarta Utara	65,9%	65,9%	65,9%	71,89%	75,99%	75,90%	76,04%	76,52%

Sumber 1: Diolah dari kpu.go.id

Tingkat partisipasi masyarakat kota Jakarta Timur dalam hal ini apabila dikomparasikan dengan kota-kota lain di provinsi DKI Jakarta. Kota Jakarta Timur masih lebih baik apabila dibandingkan dengan kota Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara dalam hal tingkat partisipasi pemilihnya dalam pemilu tahun 2014 dan 2019. Pada pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden tahun 2019, kota Jakarta Timur 3,94% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kota Jakarta Utara yang memiliki tingkat partisipasi terendah dalam lingkup Provinsi DKI Jakarta. Namun, kota Jakarta Timur masih lebih rendah dari Kep. Seribu pada tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan 2019. Melalui data tersebut tentunya tingkat partisipasi pada masyarakat kota Jakarta Timur memiliki pengaruh terhadap peningkatan angka partisipasi pemilih di DKI Jakarta.

Tabel 2: Total suara Partisipasi Pemilih kotamadya Jakarta Timur pada Pilpres tahun 2014-2019

Kec. Jakarta Timur	PILPRES 2014 (75,98%)		PILPRES 2019 (80,48%)	
	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih
Duren Sawit	296.526	225.196	325.483	264.401
Cipayung	166.155	130.808	200.015	165.468
Ciracas	221.901	180.436	221.901	180.436
Jatinegara	238.585	175.424	254.123	201.200
Kramat Jati	199.713	151.537	227.640	183.065
Makassar	137.795	109.156	155.543	128.849
Matraman	132.470	98.058	144.150	115.221
Pasar Rebo	136.025	107.477	156.456	130.870
Pulogadung	214.316	157.486	232.454	184.535
Cakung	350.346	255.327	403.528	314.137
Total Suara	2.093.832	1.590.905	2.321.293	1.868.182

Sumber 2: Diolah dari jakartatimur.kpu.go.id

Merujuk pada data tabel diatas, partisipasi masyarakat wilayah Jakarta Timur dalam pilpres 2019 menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi pada pilpres 2014, di mana wilayah Jakarta Timur mencapai 80% dan meningkat sebesar 5% dari tahun 2014, yang artinya melebihi target nasional sebesar 77,5%, hal ini patut dianggap sebuah keberhasilan dan menjadi salah satu kebanggaan bagi KPU kota administrasi Jakarta Timur. Tingkat partisipasi di Kota Jakarta Timur mendapat hasil yang

memuaskan, yaitu 80% untuk Pilpres, 79,84% untuk DPR, 80% untuk DPD, 78.17% untuk DPRD Dapil IV, 79.21% untuk DPRD Dapil V, dan 82.16% untuk DPRD Dapil VI. Menganalisa terkait peran KPU kota administrasi Jakarta Timur untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada saat pilpres 2019 sangatlah menarik untuk diteliti lebih jauh lagi, dikarenakan KPU kota administrasi Jakarta Timur mendapatkan banyak penghargaan dan apresiasi yang luar biasa dari berbagai pihak, beban yang begitu berat dalam penyelenggaraan pemilu membuahkan hasil yang manis untuk dikenang sepanjang masa, penghargaan dan apresiasi tersebut adalah:

1. Penghargaan Pemilu Akses

KPU kota administrasi Jakarta Timur mendapatkan dua penghargaan yaitu Juara 1 Pemilu Akses Tingkat Nasional yang diberikan oleh KPU RI dan penghargaan berikutnya yaitu penghargaan yang diberikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta

2. Penghargaan Satker Terkompak

Penghargaan yang diberikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta terkait koordinasi dan hubungan di dalam satker KPU kota administrasi Jakarta Timur

3. Penghargaan Penyediaan Data Teknis Pemilu

Juara 1 dalam bidang perhitungan suara (tunggra) yaitu dalam penyediaan data teknis

4. Penghargaan Dalam Bidang Anggaran

KPU kota administrasi Jakarta Timur mendapatkan Juara 2 dalam kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2018 dengan bobot IKPA 88.18 5.

5. Penghargaan Dalam Bidang Hukum

KPU kota administrasi Jakarta Timur mendapatkan dua penghargaan, yaitu Juara 1 verifikasi parpol terbaik dan Juara 2 kategori produk hukum di website.

6. Penghargaan Dalam Bidang Pemutakhiran Data Pemilih

KPU kota administrasi Jakarta Timur mendapatkan Juara 2 dalam bidang kategori DPK Terkecil.

7. Penghargaan Dalam Bidang Sosialisasi

KPU kota administrasi Jakarta Timur mendapatkan 4 penghargaan, yaitu Juara Terpopuler RPP se-DKI Jakarta, Juara Pertama Website terbaik se-DKI Jakarta, Juara Pertama Partisipasi Pemilih Tertinggi, dan Juara Kedua Pengguna Hak Pilih Perempuan se-DKI Jakarta.

8. Apresiasi Kunjungan

KPU kota administrasi Jakarta Timur mendapatkan kunjungan dari beberapa KPU dari luar DKI Jakarta untuk melakukan studi banding dan komparasi terkait pemilu akses dimana KPU kota administrasi Jakarta Timur mendapatkan Juara Pertama tingkat Nasional selain itu studi banding tentang Rumah Pintar Pemilu (RPP), studi banding tentang data pemilih dan studi banding tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Produk Hukum, diantaranya yang datang berkunjung adalah:

- a) KPU Kota Pontianak
- b) KPU Kabupaten Morowali
- c) KPU Kabupaten Pulang Pisau
- d) KPU Kota Serang
- e) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
- f) KPU Kabupaten Pekalongan
- g) KPU Kota Ternate
- h) KPU Kota Balik Papan

KPU kota administrasi Jakarta Timur dan segenap penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak henti-hentinya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan banyak stakeholders untuk mensukseskan pemilu (Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Jakarta Timur, Kejari Jakarta Timur,

Kepala Panti Sosial, Kapolres Metro Jakarta Timur, Dandim Kota Jakarta Timur, Kodim 0505, LANUD Halim Perdana Kusuma, Bakesbangpol Kota Jakarta Timur, Kasudin Dukcapil Kota Jakarta Timur, KA Lapas/Rutan Se- Kota Jakarta Timur, dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Jakarta Timur) sehingga para stakeholders merasa bahwa suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 merupakan kesuksesan bersama-sama. Kekompakan dan kerjasama yang baik antara penyelenggara dan juga antar stakeholders merupakan bagian yang utama sebagai kunci suksesnya pemilu serentak tahun 2019.

KPU kota administrasi Jakarta Timur dengan stakeholders tentu menemukan permasalahan saat suasana padatnya tahapan pemilu hingga hari pemungutan suara terlaksana, namun hal tersebut bukan menjadi hambatan karena KPU kota administrasi Jakarta Timur dan stakeholders memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan pemilu, sehingga dalam menghadapi masalah KPU kota administrasi Jakarta Timur dan stakeholders yang ada di Jakarta Timur senantiasa melakukan koordinasi yang intense, melalui hal tersebut permasalahan apapun yang ditemukan dapat diselesaikan dengan baik.

KPU kota administrasi Jakarta Timur bekerja sama dengan Civil Society dalam bentuk sosialisasi untuk menjalankan peran KPU. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu 2019 dilaksanakan dengan memanfaatkan forum-forum warga yang memang sudah ada di masyarakat, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun tingkat RT, salah satu bentuk kegiatan sosialisasi berbasis forum warga yang dilaksanakan oleh KPU kota administrasi Jakarta Timur adalah “Nonton Bareng” Pertandingan Final Piala Dunia Prancis vs Kroasia yang digelar di 10 titik di seluruh Kantor Kecamatan di Jakarta Timur pada tanggal 15 Juli 2018 mulai pukul 20.00 WIB dengan menghadirkan Karang Taruna, FKDM dan para tokoh masyarakat setempat, sebelum pelaksanaan nonton pertandingan bola dimulai, masyarakat sudah berkumpul, dan disitulah momen yang dimanfaatkan oleh KPU kota administrasi Jakarta Timur melalui PPK di setiap Kecamatan untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemilu 2019, ketika melaksanakan sosialisasi dengan metode tatap muka, KPU kota administrasi Jakarta Timur juga bekerja sama dengan banyak pihak, antara lain dengan lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat,

LSM serta para tokoh masyarakat maupun tokoh agama, ada lebih dari 50 kegiatan sosialisasi secara tatap muka yang dilaksanakan oleh KPU kota administrasi Jakarta Timur (Tri Endraningsih, 2022).

Pemilu 2019 merupakan pemilu terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia. Lalu, pemilu tersebut adalah pemilu satu hari terbesar sedunia. Kompleksitas sistem pemilu dan jumlah yang terlibat dalam pemilu tersebut menjadi acuan bagi banyak pihak. Indonesia pada hari tersebut melibatkan petugas dalam skala besar yang terdapat di 7.201 kecamatan, 83.400 desa, dan 809.531 TPS. Maka pemilu ini melibatkan 36.005 PPK, 250.200 PPS, dan 5.666.717 KPPS. Mendekati pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, KPU kota administrasi Jakarta Timur terus gencar dan masif dalam mensosialisasikan pemilu, dengan harapan nantinya akan ada proses transfer pengetahuan terkait pendidikan politik yang akan membentuk pemilih yang cerdas dan rasional. Peran KPU kota administrasi Jakarta Timur menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilu yang akan menghasilkan pemimpin yang mayoritas dikehendaki rakyat.

Peran KPU kota administrasi Jakarta Timur dalam mengatasi kendala, tantangan dan hambatan yang ada dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilpres 2019 yaitu dengan melakukan sosialisasi yang intens, menginformasikan seluruh tahapan yang sedang berjalan, contohnya ketika proses pendataan pemilih maka KPU kota administrasi Jakarta Timur akan menginformasikan dan berusaha menjangkau seluruh masyarakat untuk menghimbau agar mendaftarkan dirinya melalui PPS di tingkat kelurahan, KPU berusaha mendata dan memastikan semua warga yang memiliki hak pilih masuk dalam daftar pemilih, kemudian pada saat pemilu berlangsung warga dapat menyalurkan aspirasi dengan menggunakan hak suaranya. KPU kota administrasi Jakarta Timur memaksimalkan segala macam potensi yang ada ketika proses pendataan pemilih, segala permasalahan seperti masyarakat yang belum terdata akan diselesaikan oleh KPU kota administrasi Jakarta Timur dengan langsung mendatangi tempat yang bermasalah (Jemput Bola).

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian peneliti:

Penelitian Pertama yang menjadi rujukan berjudul **“Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015”** yang ditulis oleh Dwi Haryono (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana rencana KPU Kota Samarinda dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Samarinda tahun 2015. Hasil penelitian tersebut dihasilkan dengan menggunakan metodologi penelitian verifikasi atau penyimpulan data, penyajian data dan kondensasi data, yang bisa diketahui bahwa KPU kota Samarinda menggunakan beberapa strategi yang digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih, dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas (Capacity Building) PPK, PPS dan KPPS, memperkuat komunikasi dan keterbukaan informasi KPU kepada publik, sosialisasi tatap muka, sosialisasi melalui media, pelatihan oleh para ahli kepada pengurus osis dan guru PPKN di kota Samarinda, pemilihan ketua osis (PEMILOS) dan juga pemilihan duta pemilih pemula. Berdasarkan penelitian tersebut, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2015 masih rendah walaupun sebagai lembaga pemilihan umum, KPU kota Samarinda sudah menggunakan berbagai metode dalam meningkatkan partisipasi pemilih, namun angka partisipasi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2015 di Samarinda masih terbilang rendah.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Satrio Dwi Haryono (2018) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas terkait Strategi KPU tingkat kota dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Meskipun memiliki beberapa kesamaan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu perbedaan yang menunjukkan angka partisipasi pemilih masih rendah, sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan pada keberhasilan peran KPU Kota Jakarta Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilpres 2019.

Penelitian relevan kedua, merupakan jurnal yang telah ditulis oleh Medyana Endria Novitasari dan Suhartono (2020) yang berjudul **“Partisipasi Politik**

Johannes Situmeang, 2023

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH MASYARAKAT KOTA JAKARTA TIMUR PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019

12

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Pemilih Pemula Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Desa Kendalsewu-Tarik-Sidoarjo". Penelitian tersebut membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Desa Kendalsewu pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Desa Kendalsewu termasuk dalam kategori baik, dikarenakan jumlah suara yang diterima adalah 112 dari 132 dari daftar pemilih tetap atau 84,8%. Walaupun dikategorikan baik, ditemukan hambatan yang dihadapi pemilih pemula seperti undangan (C6) yang tidak disediakan serta adanya urusan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan di Desa Kendalsewu. Berdasarkan penelitian tersebut sudah sangat baik dalam hal menjelaskan Peran KPPS dan menjalankan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Desa Kendalsewu.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Medyana Endria Novitasari dan Suhartono (2020) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu perbedaan objek penelitian dan lebih memfokuskan pada keberhasilan peran KPU Kota Jakarta Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilpres 2019.

Penelitian relevan ketiga, merupakan jurnal yang ditulis oleh Fety Novianti dan Erna Octavia (2018) dengan judul "**Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat**". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang (1) Potret umum tentang realitas partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat; (2) Program kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik untuk pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat; (3) Permasalahan yang dialami Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat; (4) Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan permasalahan dalam meningkatkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat. Hasil dari

pengamatan tersebut kemudian menunjukkan bahwa kinerja KPU kota Pontianak Kecamatan Pontianak Barat terkait sosialisasi yang dilakukan selama pemilu tahun 2014 sudah berjalan dengan cukup baik, namun ada hambatan yaitu kesadaran politik warga negara yang masih kurang dan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDA) yakni diinternal KPU kecamatan Pontianak Barat. Berdasarkan penelitian tersebut sudah sangat baik dalam hal menjelaskan peran KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula melalui beberapa strategi yang telah dilaksanakan.

Persamaan penelitian yang dilakukan Fety Novianti dan Erna Octavia (2018) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas peran KPU meningkatkan partisipasi pemilih, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu lebih memfokuskan pada keberhasilan peran KPU Kota Jakarta Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih secara umum pada pilpres 2019.

Penelitian relevan keempat, merupakan jurnal yang ditulis oleh Rifail Khair Harefa dan Abrar Adhani (2021) dengan judul **“The Role Of The General Election Commission To Increase Community Political Participation In The 2020 General Election Of Medan City”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Medan betul sudah dilakukan dengan baik, namun dari hasil wawancara dengan masyarakat di kota Medan, KPU belum menyampaikan sosialisasi secara langsung, sehingga masyarakat tidak mengetahui pesan atau informasi yang disampaikan KPU. Penelitian relevan kelima, merupakan Journal yang ditulis oleh Andina Elok Puri Maharani dan Rizma Dwi Nidia (2019) dengan judul **“Challenges Of The Indonesian Republic General Election Commission (KPU RI) To Increase Voter Participation”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan pemilu adalah berita hoax, beberapa hambatan yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok pemilih (pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas) dan beberapa hambatan lainnya. Penelitian relevan keenam, merupakan jurnal yang ditulis oleh Agus Priyanto, Eko Priyo Purnomo, DKK (2021) dengan judul **“The Influence of**

Social Media (Instagram) of Bantul’s General Election Commissions on Voters Participation in The 2019 Elections”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bantul menggunakan media sosial (Instagram) sebagai sarana sosialisasi kepada pemilih dan pada tahun 2019 Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi pada Pemilu 2014. Persentase partisipasi pemilih pada tahun 2019 menunjukkan 87,9% dari total jumlah pemilih, sedangkan pada tahun 2014 partisipasi pemilih hanya 81%. Penelitian relevan ketujuh, merupakan jurnal dari Jurnal Cita Hukum yang ditulis oleh Ida Farida, M. Ardiansyah, Yetti Reffiani (2021) dengan judul **“The Strategy of General Election Commission (KPU) in Increasing Women's Roles in Pesawaran District”**. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan peran perempuan dalam pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara memaksimalkan kemampuan media elektronik dan media internet untuk bersosialisasi, meningkatkan 15ocus1515ma dari organisasi terkait untuk bersosialisasi, dan Validasi Data Pemilih.

Persamaan terhadap penelitian ke 4 hingga ke 7 dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas peran KPU. Meskipun memiliki beberapa kesamaan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji yaitu lebih memfokuskan pada keberhasilan peran KPU Kota Jakarta Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih secara menyeluruh pada pilpres 2019.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dan menjadi penopang dalam penelitian ini, setidaknya terdapat pembaharuan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, karena dalam penelitian ini berlokasi pada masyarakat kota Jakarta Timur dan akan berfokus pada keberhasilan peran KPU Kota Jakarta Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilpres 2019.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dari penelitian ini yaitu, Bagaimana peran KPU kota administrasi Jakarta Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilpres tahun 2019?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui langkah dan strategi yang dilakukan oleh KPU kota administrasi Jakarta Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih berdasarkan studi kasus pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
2. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi strategi terhadap partisipasi pemilih masyarakat Jakarta Timur pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat - manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

I.4.1 Manfaat Akademis

Sebagai referensi dan juga memberikan manfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa maupun mahasiswi ilmu politik terhadap peran dan strategi KPU kota administrasi Jakarta Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat.

I.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat tentang pentingnya peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dan referensi bagi penelitian mengenai sosial di UPN Veteran Jakarta.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang akan serta digunakan, tujuan penelitian, sistematika penulisan, dan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang akan digunakan dalam penelitian yang berisi persamaan dan juga perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu sehingga terlihat kebaruan dari penelitian yang akan diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan terkait teori dan konsep yang akan digunakan, serta kerangka berpikir penelitian.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang akan digunakan terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, lokasi analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penyajian data yang menampilkan lokasi penelitian, tugas dan wewenang KPU kota sebagai bahan dari data 18ocus penelitian, analisis data penelitian yang menampilkan partisipasi dan juga peran yang dilakukan oleh KPU kota Jakarta Timur, serta hasil penelitian yang memuat temuan-temuan yang ditemukan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan peneliti terkait pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian dan juga saran yang merupakan isi alternatif yang akan di pakai sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan terkait penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi kumpulan sumber literatur yang akan digunakan oleh peneliti untuk menyusun proposal penelitian skripsi.